

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang luas, yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Untuk hal yang demikian perlu pemerataan pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari adanya ketimpangan antara pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan pembangunan tersebut.

Jika kita perhatikan dengan seksama, sesungguhnya sejarah Indonesia pernah ditandai oleh rentetan-rentetan sejarah pergolakan daerah-daerah yang intinya menuntut perhatian Pemerintah Pusat yang wajar dan sepadan kepada masing-masing daerah, yang dikenal sebagai tuntutan daerah. Tidak lain hanya sekedar keinginan adanya semacam keseimbangan dan keadilan dalam hal pelaksanaan pembangunan secara nasional, yang pada hakekatnya dananya didapat dari berbagai daerah.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dicantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang berbunyi : “ mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur “.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang

aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Supaya pembangunan itu dapat berkembang dengan pesat harus digerakkan semua potensi yang ada secara efisien dan efektif.

Pemerintah telah menetapkan tujuan dari pembangunan itu yaitu yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Di dalam suasana perikhidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis.
3. Di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.
4. Dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Dalam mewujudkan harapan tersebut perlu dilakukan keseimbangan baik pembangunan materiil sprituil, keseimbangan kcta dan desa, keseimbangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Hal inilah yang menjadikan pelaksanaan pembangunan itu tidaklah mudah tetapi mempunyai hambatan yang merupakan hal yang harus diatasi oleh Pemerintah dan masyarakat.

Salah satu segi yang utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut menyangkut sistem administrasi dalam pelaksanaan kerja Pemerintah guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Indonesia yang memasuki masa transisi dalam hal perkembangan memang memerlukan kebijaksanaan akurat dan memprioritaskan pembangunan tersebut agar supaya sumber daya dan dana yang ada dapat dipergunakan